

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PARTISIPASI PRAJURIT TNI DALAM *UNITED NATIONS STAFF OFFICER COURSE*

Oleh :

Arvie Prima Kusuma Sumedi¹⁾, Lukman Yudho Prakoso²⁾, Deni Dadang A.R³⁾

^{1,2,3} Universitas Pertahanan Republik Indonesia

¹email: ma_ice_tro@yahoo.com

²email: lukman.prakoso@idu.ac.id

³email: denidar@ymail.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 21 Juli 2025

Revisi, 15 Agustus 2025

Diterima, 20 Agustus 2025

Publish, 15 September 2025

Kata Kunci :

Implementasi Kebijakan,

Prajurit TNI,

PMPP TNI,

Misi Pemeliharaan Perdamaian.

ABSTRAK

United Nations Staff Officer Course merupakan kursus yang ditujukan untuk melatih prajurit TNI yang akan menjadi Staf yang bertugas di bawah bendera PBB. Penyelenggaraannya merupakan kerjasama antara PMPP TNI dengan Global Peace Operations Initiative (GPOI) Amerika Serikat. Idealnya, kursus ini diikuti oleh prajurit TNI yang akan diberangkatkan penugasan atau yang telah kembali dari penugasan, namun kenyataannya banyak peserta yang diikutkan bukan prajurit TNI yang akan diberangkatkan penugasan PBB sehingga penyelenggaraan kursus kurang optimal. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas tentang implementasi kebijakan tentang partisipasi prajurit TNI dalam *United Nations Staff Officer Course* yang diselenggarakan oleh Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan ini diimplementasikan dan dievaluasi untuk meningkatkan kapabilitas prajurit TNI dalam misi pemeliharaan perdamaian internasional. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi beberapa tantangan dalam implementasi kebijakan, termasuk belum adanya kebijakan tentang pelaksanaan kursus dan mekanisme partisipasi prajurit untuk mengikuti *United Nations Staff Officer Course*, dan kurangnya koordinasi antar instansi di dalam TNI dalam mempersiapkan peserta pelatihan sehingga peserta tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Hasil penelitian ini merekomendasikan pembuatan kebijakan terkait partisipasi prajurit dalam *United Nations Staff Officer Course* dan peningkatan sinergi antar matra TNI untuk mempersiapkan pasukan penjaga perdamaian yang lebih kompeten dan memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh PBB.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Nama: Arvie Prima Kusuma Sumedi

Afiliasi: Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Email: ma_ice_tro@yahoo.com

1. PENDAHULUAN

Sejak tahun 1957, Indonesia telah aktif berpartisipasi dalam misi pemeliharaan perdamaian internasional, dimulai dengan pengiriman Kontingen Garuda (Konga) I ke Mesir untuk mendukung United Nations Emergency Force (UNEF). Hingga tahun 2023, lebih dari 51.000 personel TNI telah dikirimkan untuk mendukung misi-misi perdamaian

di berbagai belahan dunia. Untuk mempersiapkan prajurit secara profesional sesuai standar internasional, pada tahun 2007, TNI membentuk Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP TNI) yang bertugas melatih dan membekali pasukan sesuai dengan ketentuan United Nations Integrated Training Service (UN ITS).

UN Integrated Training Service dalam websitenya menyatakan bahwa perwira staff militer yang bertugas di OPPD PBB diharuskan setidaknya telah menyelesaikan sekolah staff masing-masing negara. Selain *Predeployment Training* (PDT), UN ITS merekomendasikan kursus-kursus spesialisasi untuk mempersiapkan pasukan penjaga perdamaian agar dapat melaksanakan tugasnya secara efektif sesuai fungsi dan penugasannya. UNSOC merupakan salah satu kursus yang direkomendasikan untuk mendukung *peacekeepers* sebelum berangkat penugasan PBB. Peserta kursus merupakan personel militer yang telah diseleksi oleh masing-masing negara untuk ditugaskan ke misi OPPD PBB.

TNI setiap tahunnya mengirimkan lebih dari 50 perwira TNI sebagai staf militer yang bertugas di berbagai misi PBB sehingga TNI perlu untuk meningkatkan kapabilitas staf militer yang diberangkatkan penugasan PBB dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh PBB. Oleh karena itu, PMPP TNI bekerjasama dengan Amerika Serikat melalui Global Peace Operations Initiative (GPOI) dalam kerangka United States-Indonesia Bilateral Defense Discussions (USIBDD) menyelenggarakan kursus Global Peace Operations Initiative United Nations Staff Officer Course (UNSOC) di PMPP TNI, Sentul, Bogor. Tujuannya adalah untuk memberikan bekal pengetahuan kepada para peserta terkait dengan prosedur pengambilan keputusan organisasi PBB dalam tugas operasi pemeliharaan perdamaian dunia, khususnya sebagai Perwira staf pada UN Peacekeeping Operations. Kegiatan kerjasama PMPP TNI dan GPOI sudah berlangsung lebih dari satu dekade, akan tetapi penelitian ini dibatasi pada penyelenggaraan kursus UNSOC yang dilaksanakan dari tahun 2021 sampai dengan 2023 di PMPP TNI.

Meskipun inisiatif ini telah berjalan selama beberapa tahun, masih terdapat sejumlah kesenjangan dalam implementasi partisipasi prajurit TNI dalam UNSOC di PMPP TNI. Idealnya sebagaimana direkomendasikan oleh UN ITS, peserta kursus adalah prajurit TNI yang akan diberangkatkan penugasan sebagai staf militer di OPPD. Dan berdasarkan kesepakatan kerjasama pada tahap perencanaan kegiatan kriteria tersebut ditambah dengan personel yang sudah melaksanakan Latpratugas dan personel yang sudah selesai melaksanakan penugasan OPPD. Kriteria tersebut dimaksudkan agar peserta kursus sudah memiliki dasar pengetahuan dalam OPPD dan peserta yang sudah pernah melaksanakan penugasan OPPD dapat bertukar pengalaman di lapangan yang mereka hadapi.

Namun demikian, berdasarkan laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan banyak prajurit TNI yang diikutkan kursus ini bukan mereka yang sudah pernah mengikuti Latihan Pratugas Operasi Pemeliharaan Perdamaian (OPPD) yang diproyeksikan bertugas dan atau yang sudah

menyelesaikan misi OPPD. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan kursus maupun ketidakpuasan dari *counterpart* GPOI karena TNI belum menyediakan peserta yang sesuai dengan kriteria hasil kesepakatan bersama.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan pada tataran kebijakan yang mengatur pelaksanaan keterlibatan prajurit dalam UNSOC sehingga dapat diperoleh rekomendasi-rekomendasi guna meningkatkan penyelenggaraan UNSOC dan menjaga citra baik TNI di dunia internasional. Penelitian ini akan menggunakan Petunjuk Pelaksanaan Pelibatan TNI Pada Operasi Pemeliharaan Perdamaian Dunia, Direktif UNSOC 2021 sampai dengan 2023 serta permohonan peserta UNSOC di tahun yang sama sebagai acuan. Tujuan akhir dari studi ini adalah memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih terstruktur guna memastikan kesiapan optimal prajurit TNI dalam menjalankan misi pemeliharaan perdamaian di masa mendatang.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengkaji kebijakan partisipasi prajurit TNI dalam United Nations Staff Officer Course di PMPP TNI. Metode kualitatif dipilih karena sesuai untuk menggali pemahaman mendalam mengenai tantangan, implementasi, dan hasil kebijakan ini. Data yang dikumpulkan mencakup data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber utama seperti staf PMPP TNI dan Sops TNI, serta observasi partisipatif terhadap proses pelatihan. Data sekunder mencakup dokumen resmi seperti direktif kursus dan laporan pelaksanaan. Penelitian ini juga melibatkan studi pustaka untuk memperkuat analisis data lapangan.

Teknik pengumpulan data mencakup wawancara, observasi partisipatif, dan studi pustaka. Wawancara dilakukan dengan tokoh-tokoh penting seperti Komandan PMPP TNI dan staf terkait, sementara observasi partisipatif memungkinkan peneliti mendapatkan pemahaman langsung di lapangan. Data yang terkumpul diolah menggunakan tiga tahap utama: reduksi data untuk menyaring informasi penting, penyajian data dalam bentuk narasi dan tabel, serta penarikan kesimpulan berdasarkan evaluasi temuan lapangan.

Metodologi ini dipilih untuk memastikan studi yang komprehensif dan memungkinkan replikasi oleh peneliti lain jika diperlukan, menjamin validitas dan keandalan hasil penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini memberikan gambaran mendalam mengenai kebijakan dalam mengikutsertakan prajurit TNI, khususnya oleh PMPP TNI dan Mabes TNI dalam hal ini Staf Ops TNI, dalam *United Nations Staff Officer Course*

menggunakan teori implementasi kebijakan dan teori evaluasi kebijakan. Selain itu, hasil penelitian ini juga mengungkapkan tantangan yang dihadapi dalam menyelenggarakan kursus dan mengikutsertakan prajurit TNI dalam *United Nations Staff Officer Course*.

Peacekeeping Operations Course adalah kursus yang bertemakan Operasi Pemeliharaan Perdamaian yang diselenggarakan oleh setiap negara yang memiliki Pusat Misi Perdamaian atau *Peacekeeping Center (PKC)*. Kursus ini merupakan bagian dari program yang direkomendasikan oleh *Integrated Training Service (ITS)*, yaitu divisi di PBB yang menangani pelatihan untuk meningkatkan kapabilitas *peacekeeper* yang akan diberangkatkan ke misi OPPD PBB. Kursus-kursus ini berfokus pada materi spesifik yang sesuai dengan jabatan tertentu dan prioritas materi yang saling berkaitan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas di misi OPPD. ITS menyediakan referensi pelatihan secara online yang mudah diakses oleh siapa saja, karena menganggap bahwa pelatihan untuk misi OPPD adalah investasi penting dalam membantu personel militer, polisi, dan sipil dalam menjalankan mandat PBB. Tujuan utama dari pelatihan ini adalah untuk melengkapi personel dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang memungkinkan mereka untuk menjalankan operasi perdamaian sesuai dengan prinsip-prinsip, kebijakan, pedoman PBB, serta pengalaman lapangan.

Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI sebagai badan pelaksana pusat TNI, memiliki fungsi untuk merencanakan, menyiapkan, menyelenggarakan, serta mengembangkan kerja sama internasional dalam bidang OPPD, dan meningkatkan kemampuan perorangan maupun satuan yang dipersiapkan untuk misi OPPD. Dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, PMPP TNI telah menyelenggarakan berbagai kursus Operasi Pemeliharaan Perdamaian (PKO) di setiap tahunnya. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas personel militer dalam menghadapi tantangan dalam misi pemeliharaan perdamaian internasional. PMPP TNI berperan sebagai satuan penyelenggara kursus yang komprehensif, menyediakan materi pelatihan yang relevan dan praktis bagi para peserta. Kursus yang diselenggarakan oleh PMPP TNI antara lain *Global Peace Operations Initiative (GPOI) United Nations Military Peacekeeping Intelligence (MPKI) Course*, *GPOI United Nations Staff Officer Course (UNSOC)*, *GPOI Protection of Civilian (POC) Course*, *GPOI United Nations Logistic (UNLOG) Course*, serta beberapa kursus lainnya.

Dengan mengikuti *United Nations Staff Officer Course (UNSOC)* ini *peacekeeper* TNI dapat memperdalam pemahaman mereka terhadap isu-isu penting dalam OPPD seperti *The UN Operational Environment*, *The UN System*, *Military component Planning Process*, *Rules of Engagement (RoE) and Use of Force*, dan *UN Core Pre-Deployment*

Training Material. Dengan materi ini peserta akan memiliki pemahaman mendalam tentang lingkungan operasi yang akan menjadi tempat penugasan berikut dengan analisa dampak dan cara bertindak yang mungkin bisa diambil melalui mekanisme proses perencanaan yang terpadu. Perumusan cara bertindak dan pengambilan Keputusan tentunya akan memperhatikan sistem kerja dan organisasi atau unit yang terdapat di misi PBB sehingga semua aspek dapat berjalan bersama dan tidak tumpang tindih. Peserta juga akan memiliki pemahaman yang baik tentang penggunaan kekuatan terutama untuk perlindungan warga sipil. Kursus ini juga meningkatkan keterampilan prajurit dalam bidang operasi, logistik, *CIMIC*, serta fungsi staf lainnya yang relevan dengan tugas mereka di lapangan.

Dukungan personel dan peralatan yang memadai sangat diperlukan TNI untuk mewujudkan kebijakan Pelibatan TNI dalam OPPD PBB. TNI sendiri telah menyusun mekanisme pelibatan personelnnya melalui kegiatan *pre-deployment*, yang meliputi seleksi personel, pelatihan, penyiapan peralatan, serta pemberangkatan. Sebagai bagian dari upaya peningkatan kapabilitas *peacekeepers* TNI dan menjaga citra baik TNI sebagai bagian dari kontributor pasukan penjaga perdamaian, program *United Nations Staff Officer Course* memerlukan partisipasi prajurit TNI, baik sebagai penyelenggara, instruktur, maupun peserta kursus. Partisipasi ini bertujuan meningkatkan kemampuan dan keterampilan personel *peacekeeper* TNI dalam menjalankan misi OPPD, terutama mereka yang telah menyelesaikan *Latihan Pratusas* sebelum diberangkatkan ke misi PBB.

Prajurit TNI yang mengikuti *United Nations Staff Officer Course* adalah mereka yang akan diberangkatkan ke misi OPPD dan telah menyelesaikan *Latpratusas* atau prajurit yang telah menyelesaikan misi. Seleksi untuk menjadi bagian dari *peacekeeper* Indonesia meliputi persyaratan umum dan khusus seperti kesehatan umum, kemampuan bahasa Inggris (*ALCPT* dan *ADFELPS*), keterampilan komputer, mengemudi, dan kesegaran jasmani. Setelah lulus seleksi, mereka akan mengikuti *Latpratusas* selama 30 hari, yang mencakup materi-materi inti seperti *Core Pre-Deployment Training Materials (CPTM)* dan simulasi lapangan.

Prajurit yang telah menyelesaikan penugasan OPPD juga dapat mengikuti kursus ini untuk membagikan pengalaman dan praktik terbaik (*best practices*) dari penugasan mereka. Hal ini penting sebagai bahan pelajaran untuk meningkatkan keberhasilan misi di masa depan. Kombinasi antara teori dan pengalaman lapangan membuat *United Nations Staff Officer Course* menjadi lebih efektif dalam menyiapkan prajurit TNI untuk misi OPPD. Meskipun demikian, kebijakan terkait penyediaan dan pelibatan prajurit TNI dalam kursus ini belum sepenuhnya terperinci.

Dari gambaran ini, terlihat bahwa *United Nations Staff Officer Course* memainkan peran penting dalam menyiapkan personel TNI untuk misi pemeliharaan perdamaian dunia. Kursus ini tidak hanya memberikan pelatihan teknis, tetapi juga materi relevan untuk menghadapi tantangan operasional, seperti perlindungan sipil, manajemen konflik, dan hukum humaniter internasional.

Kondisi partisipasi Prajurit TNI dalam pelaksanaan *United Nations Staff Officer Course* Aspek Kebijakan

Aturan Pelibatan TNI yang ada saat ini belum memasukkan *United Nations Staff Officer Course* sebagai pelatihan yang digunakan untuk menyiapkan *peacekeeper* Indonesia sebelum keberangkatan ke daerah misi. Akibatnya, partisipasi dalam *United Nations Staff Officer Course* dianggap oleh TNI AD, TNI AU, dan TNI AL sebagai mekanisme kursus dan pendidikan seperti pada umumnya dilaksanakan di lingkungan matra masing-masing. Adapun umumnya mekanisme berupa pengiriman surat permintaan personel peserta kursus kepada matra, kemudian matra menunjuk personelnnya sesuai dengan kebijakan matra masing-masing untuk mengikuti kursus-kursus *OPPD*. Dari hasil wawancara dengan staf Ditbinkersin PMPP TNI, hal tersebut mengakibatkan personel yang mengikuti kursus tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh penyelenggara. Tidak hanya pada *United Nations Staff Officer Course* tetapi juga terjadi pada kursus dan Latihan Bersama yang diselenggarakan oleh PMPP TNI.

Aspek Prajurit TNI

Dari hasil penelitian, TNI AD sudah memanfaatkan *United Nations Staff Officer Course* untuk meningkatkan kapabilitas prajurit TNI AD, terlihat dari kuantitas personel TNI AD yang mengikuti kursus tersebut lebih banyak dari matra Laut dan Udara. Namun demikian, secara kualitas, personel yang dikirimkan bukanlah personel yang akan diberangkatkan ke misi *OPPD* dan bukan pula personel yang telah selesai kembali dari daerah penugasan sehingga personel tersebut masih awam terhadap materi-materi *OPPD*. Berbeda bila yang menjadi peserta kursus adalah personel yang telah menyelesaikan *Latpratugas* atau yang purna tugas, mereka telah memiliki dasar dan bekal materi *OPPD* selama *Latpratugas* dan selama penugasan. Dengan bekal ini, pengetahuan dan keterampilan mereka meningkat seiring dengan kursus yang mereka ikuti.

Kontribusi Kursus terhadap Peningkatan Kapabilitas Prajurit TNI di Misi *OPPD*

UNSOC (*United Nations Staff Officer Course*), memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kapabilitas prajurit TNI untuk beroperasi di bawah mandat PBB. UNSOC (*United Nations Staff Officer Course*) memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan, kapabilitas kepemimpinan, dan koordinasi prajurit TNI yang terlibat dalam misi pemeliharaan

perdamaian PBB. Kursus ini dirancang untuk melatih prajurit TNI agar dapat berfungsi secara efektif sebagai staf dalam misi PBB, yang menuntut kemampuan merencanakan dan mengarahkan operasi multinasional. Melalui UNSOC, prajurit TNI mendapatkan pemahaman mendalam tentang sistem komando PBB, yang menjadi dasar penting dalam misi perdamaian yang melibatkan berbagai negara dan matra militer. Mereka juga mempelajari *Rules of Engagement (RoE)*, yaitu aturan penggunaan kekuatan yang ketat, sehingga mampu mengambil keputusan yang sesuai dalam situasi konflik tanpa melanggar mandat misi.

Lebih lanjut, UNSOC mempersiapkan prajurit TNI dalam tata cara perencanaan operasional, yang mencakup perencanaan strategis hingga pelaksanaan di lapangan. Kemampuan ini sangat penting karena operasi multinasional PBB menuntut kerja sama yang erat antara berbagai komponen, termasuk militer, sipil, dan organisasi kemanusiaan. Dengan pelatihan ini, prajurit TNI mampu mengkoordinasikan operasi yang kompleks dan beragam, memastikan bahwa misi berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. UNSOC tidak hanya memperkuat kemampuan teknis, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri prajurit TNI dalam menjalankan peran kepemimpinan di lingkungan multinasional yang dinamis.

Implementasi Kebijakan tentang Partisipasi Prajurit TNI dalam *United Nations Staff Officer Course*

Untuk menilai keefektifan implementasi kebijakan tentang partisipasi Prajurit TNI dalam *United Nations Staff Officer Course*, peneliti menggunakan empat indikator sesuai Richard Martland (Nugroho, 2003: 179), yaitu ketepatan kebijakan, pelaksanaan, target, dan lingkungan. Hasil dan pembahasan dapat diuraikan sebagai berikut:

Ketepatan Kebijakan

Kebijakan negara dalam pengiriman misi pemeliharaan perdamaian dituangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2015, yang mengatur kriteria, syarat pengiriman, pendanaan, dan pengadaan peralatan. Namun, tidak ada ketentuan jelas mengenai pelatihan yang harus dilaksanakan oleh personel yang akan dikirimkan. Pasal 3 menekankan pentingnya kualifikasi dan standar internasional, sedangkan Pasal 9 mengatur pendanaan dari APBN untuk penyiapan personel. Ini menunjukkan bahwa pelatihan yang memadai, seperti kursus *United Nations Staff Officer Course* yang diselenggarakan oleh PMPP TNI, sangat penting agar prajurit dapat memenuhi standar internasional.

Selanjutnya, Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/906/X/2015 mengatur mekanisme pelibatan TNI dalam *OPPD*, namun tidak menjelaskan secara detail tentang penyelenggaraan kursus. TNI mensyaratkan prajurit untuk mengikuti latihan *pratugas* *OPPD* di PMPP TNI, namun kursus lain yang berkaitan

dengan OPPD tidak disebutkan, yang membuat penyelenggaraan kursus *United Nations Staff Officer Course* tidak terintegrasi dengan proses penyiapan prajurit TNI. Hal ini mengindikasikan perlunya kebijakan/regulasi tambahan yang menyatukan keikutsertaan dalam kursus dengan mekanisme penyiapan.

Ketepatan Pelaksana

PMPP TNI berperan penting dalam menyelenggarakan kursus OPPD dan sudah berusaha semaksimal mungkin. PMPP TNI diakui sebagai lembaga pelatihan perdamaian yang unggul di Asia Tenggara, dengan banyak kerjasama internasional. Kursus yang diselenggarakan diakui oleh UN Integrated Training Service, menandakan bahwa mereka memenuhi standar internasional. Oleh karena itu, pelaksana kebijakan ini dianggap tepat.

Ketepatan Target

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa personel yang dikirim oleh matra seringkali tidak sesuai dengan kriteria yang disyaratkan, yang menyebabkan peserta kesulitan memahami materi kursus. Peserta tanpa pengetahuan awal tentang operasi pemeliharaan perdamaian dunia menghadapi tantangan dalam memahami konsep-konsep kompleks. Ketidaksiharian ini dapat menghambat efektivitas pembelajaran dan mempengaruhi dinamika kelompok.

Ketepatan Lingkungan

PMPP TNI telah melaksanakan koordinasi internal dan eksternal dengan unit-unit di TNI serta negara sahabat. Koordinasi ini mencakup rapat perencanaan kursus dan komunikasi aktif untuk memastikan bahwa peserta yang dikirim sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam surat permintaan peserta kursus OPPD.

Dari penelitian didapatkan beberapa faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan yaitu pertama, dukungan politik yakni diberikan melalui Perpres Nomor 86 tahun 2015 tentang Pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian yang mendanai pengiriman misi pemeliharaan perdamaian. Kedua, dukungan strategis yaitu Melalui Peraturan Panglima TNI Nomor 73 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tugas PMPP TNI, yang memberi tugas kepada PMPP TNI untuk menyelenggarakan kegiatan hasil kerja sama internasional. Ketiga, dukungan teknis yaitu PMPP TNI menggunakan fasilitas yang dimiliki untuk menerapkan kebijakan, namun kondisi fasilitas perlu diperbarui agar penyelenggaraan kursus OPPD dapat dilakukan secara optimal.

Evaluasi implementasi kebijakan tentang partisipasi Prajurit TNI dalam *Peacekeeping Operations Course*

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait evaluasi implementasi kebijakan tentang partisipasi Prajurit TNI dalam *Peacekeeping Operations Course* dan dengan melakukan evaluasi menggunakan enam indikator evaluasi kebijakan menurut William N.

Dunn (2003:158), yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan, maka dapat diuraikan hasil dan pembahasan sebagai berikut:

Efektivitas

Kebijakan tentang partisipasi Prajurit TNI dalam *United Nations Staff Officer Course* masih belum efektif dalam pemanggilan prajurit TNI untuk mengikuti kursus ini. Hal ini menyebabkan penyelenggaraan kursus ini sering mengalami kendala dalam kualitas peserta, yang mengakibatkan kurangnya pemahaman terhadap materi kursus.

Efisiensi

Implementasi kebijakan ini masih belum sepenuhnya efisien, terutama dalam hal sinkronisasi antara waktu pelaksanaan kursus OPPD dan Latpratugas OPPD. Ketidakefisienan ini mengakibatkan pemborosan sumber daya, baik waktu maupun biaya, karena prajurit yang telah menyelesaikan Latpratugas harus kembali ke satuan asal sebelum mengikuti kursus di PMPP TNI. Kebijakan ini perlu diperbaiki dengan penyesuaian jadwal pelatihan yang lebih sinkron agar penggunaan anggaran dan waktu lebih efisien dan efektif dalam mendukung kontribusi prajurit TNI dalam misi perdamaian internasional.

Kecukupan

Kursus UNSOC memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kapabilitas prajurit TNI. Prajurit yang mengikuti kursus ini dibekali dengan keterampilan spesifik seperti perencanaan operasi, pengambilan keputusan strategis, dan koordinasi sipil-militer, yang membantu mereka lebih siap menjalankan tugas di misi perdamaian internasional.

Perataan

Kebijakan partisipasi prajurit TNI ini dikhususkan untuk Prajurit TNI yang telah menyelesaikan Latpratugas dan penugasan OPPD, sehingga tidak merata untuk semua Prajurit TNI. Namun, mengingat tujuan dan sasaran kursus adalah untuk peningkatan kemampuan dan keterampilan peacekeeper, kebijakan yang memberikan kriteria khusus ini harus semakin diperkuat. Perataan tidak berarti semua prajurit TNI bisa mengikuti kursus *United Nations Staff Officer Course*, tetapi hanya prajurit yang telah melaksanakan Latpratugas atau kembali dari penugasan yang diperbolehkan berpartisipasi.

Responsivitas

Kebijakan pelibatan TNI pada OPPD belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan kursus *United Nations Staff Officer Course*, sehingga terlihat belum responsif terhadap apa yang diperlukan dalam penyelenggaraan kursus tersebut. Hal ini terlihat dari seringnya peserta yang datang bukan yang dikriteriakan untuk mengikuti kursus.

Ketepatan

Kebijakan ini, meskipun bertujuan meningkatkan kapabilitas prajurit dalam misi

perdamaian, belum tepat sasaran dari segi pelaksanaannya. Ketidaksesuaian antara kebutuhan kursus dengan penyediaan peserta menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak sepenuhnya dipatuhi oleh matra/angkatan. Oleh karena itu, semua pemangku kebijakan dan pelaksana di lapangan perlu duduk bersama membahas kendala dan solusi atas implementasi kebijakan yang ada.

Dari evaluasi di atas, perlu dilakukan upaya-upaya untuk perbaikan penyelenggaraan UNSOC melalui pembuatan regulasi atau kebijakan yang dijadikan dasar dalam penyelenggaraan tersebut. Oleh karena itu, semua stakeholder perlu memperhatikan langkah-langkah perbaikan yang holistik sebagai berikut.

Regulasi yang tepat

Kekurangtepatan regulasi yang mengharuskan prajurit mengikuti kursus *United Nations Staff Officer Course* menyebabkan inkonsistensi dalam kesiapan personel. Dengan landasan hukum yang kuat, tentunya matra TNI akan memiliki pedoman berupa kriteria peserta yang diikutkan kursus. Tentunya regulasi tersebut perlu untuk mengintegrasikan kursus *United Nations Staff Officer Course* dengan Latpratugas yang wajib dilaksanakan oleh para *peacekeeper*.

Materi UNSOC dalam Latpratugas

Sedemikian pentingnya materi pelajaran pada UNSOC maka dapat dijadikan pertimbangan sebagai materi Pelajaran yang diberikan saat Latpratugas sehingga prajurit yang belum berkesempatan untuk mengikuti UNSOC dapat menerima kebermanfaatannya materi tersebut.

Modernisasi Fasilitas dan Teknologi

Modernisasi fasilitas dan teknologi akan memberikan dampak positif besar terhadap efektivitas pelatihan. Dengan menggunakan teknologi seperti e-learning atau smart class, prajurit akan lebih terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, perlu perhatian dari seluruh stakeholder dalam OPPD untuk meremajakan fasilitas dan teknologi yang ada di PMPP TNI.

Sinkronisasi Latihan dan Kursus

Sinkronisasi waktu pelaksanaan Latpratugas dengan jadwal kursus *United Nations Staff Officer Course* akan memberi kesempatan bagi prajurit TNI untuk mengatur kegiatannya sampai dengan pemberangkatan. Hal ini juga akan mempermudah bagi penyelenggara untuk melaksanakan *spotting* calon peserta UNSOC karena waktu yang ada sangat memungkinkan untuk melaksanakan kursus.

Dengan memperkuat Langkah-langkah ini, implementasi kebijakan tentang partisipasi prajurit TNI dalam *United Nations Staff Officer Course* dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien. Kapabilitas prajurit TNI dalam misi OPPD juga akan meningkat, dan penyelenggaraan kursus dapat membawa manfaat besar bagi prajurit TNI serta meningkatkan citra TNI dalam hubungan internasional.

4. KESIMPULAN

Meskipun terdapat kebijakan mengenai pelibatan TNI dalam Operasi Pemeliharaan Perdamaian Dunia, namun kebijakan tersebut belum mengatur secara spesifik mengenai kursus *United Nations Staff Officer Course*, yang menyebabkan kendala dalam penyelenggaraan dan ketidaksesuaian partisipasi peserta. Surat permintaan peserta kursus belum dianggap sebagai perintah resmi oleh matra TNI AD, AU, dan AL, sehingga kriteria pemilihan peserta tidak terpenuhi, mengakibatkan tujuan peningkatan kemampuan pasukan tidak tercapai.

Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pembuatan kebijakan baru yang mengatur secara rinci tentang mekanisme penyelenggaraan kursus dan pelibatan prajurit TNI, dengan sanksi bagi matra yang tidak memenuhi persyaratan pengiriman peserta. Selanjutnya direkomendasikan kepada Mabes TNI untuk mengadakan rapat koordinasi dalam mengintegrasikan langkah dan upaya antar matra TNI pada semua kegiatan yang berkaitan dengan Operasi Pemeliharaan Perdamaian Dunia.

5. REFERENSI

- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (2nd ed.). Gadjah Mada University Press
- Keohane, Robert, and Nye, Joseph. 1977. *Power and Interdependence: World Politics in Transition*.
- Keohane, Robert. 1984. *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*.
- Kingdon, John W. 1984. *Agendas, Alternatives, and Public Policies*.
- Lindblom, Charles E. 1968. *The Policy-Making Process*.
- Morgenthau, Hans. 1948. *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*.
- Nugroho, Riant. 2008. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*.
- Nye, Joseph. 2004. *Soft Power: The Means to Success in World Politics*.
- Waltz, Kenneth. 1979. *Theory of International Politics*.
- Aji, M P., & Indrawan, J. 2019. *Memahami Studi Perdamaian Sebagai Bagian Dari Ilmu Hubungan Internasional*. 9(3), 65-65. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v9i3.637>
- Aji, M P., & Indrawan, J. 2019. *Understanding Peace Studies As Part Of International Relations*. 9(3), 69-69. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v9i3.645>
- Alfajri, A., Luerdi, L., & Suwignyo, S. (2020, June 27). *Pelatihan Dan Pemberdayaan Tunas Sustainable Development Goals (SDGs) Siswa Tingkat Sma/Ma Sederajat Di Kota Pekanbaru Untuk Mewujudkan Tujuan Sustainable Cities And Communities Dan Responsible Consumption And Production*.

- 3(3), 201-208.
<https://doi.org/10.36341/jpm.v3i3.1295>
- Apandi, A. 2020. *Pendekatan Resolusi Konflik Dalam Upaya Pencegahan Konflik Regional Pada Era Digitalisasi*. 2(1), 94-94.
<https://doi.org/10.33474/jisop.v2i1.6414>
- Ardyansah, N. 2022. *Penerapan Model Problem Based Learning dalam Inovasi Pembelajaran IPS di Sekolah*. 3, 543-548.
<https://doi.org/10.30595/pssh.v3i.327>
- Budiarto, D S., & Puspitasari, M D. (2020, October 31). Meningkatkan Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money. 4(2), 153-166.
<https://doi.org/10.24176/agj.v4i2.5099>
- Fadhilah, K F. 2022. *Shuttle Diplomacy Indonesia sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Thailand-Kamboja*. Indonesian Institute of Sciences, 11(2), 179-179.
<https://doi.org/10.14203/jkw.v11i2.845>
- Fadillah, Y., Mahroza, J., Sitorus, H., & Risman, H. 2020. *The Role Of Indonesia's Female Peacekeepers In United Nations Peacekeeping Operations To Promote Gender Equality*. 6(2), 118-118. <https://doi.org/10.33172/jp.v6i2.756>
- Handoyo, H., & Muslim, M. A. (2024). Strategi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Sebagai Pasukan Perdamaian di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI (PMPP TNI). *Jurnal EMT KITA*, 8(3), 1090-1105.
<https://doi.org/10.35870/emt.v8i3.2827>
- Martani, W. R., Sumertha, I. G., & Hidayat, E. R. (2020). Peran Standby Force Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI) dalam mempersiapkan pasukan pada misi pemeliharaan perdamaian. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 6(1).
<https://doi.org/10.33172/jdp.v6i1.589>
- Pramudya, D. 2021. *Pengembangan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia sebagai Center of Peacekeeping training di Asia Tenggara*. 7(1).
<https://doi.org/10.33172/jdp.v7i1.676>
- Rozak, A., Kartini, D S., & Djuyandi, Y. 2020. *Strategi Survivalitas Warga dan Politik Survivalitas Aktor Politik pada Konflik Pertambangan*. 11(1), 53-75.
<https://doi.org/10.14710/politika.11.1.2020.53-75>
- Salsabila, S., & Sidik, H. (2023). Kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat dalam Pelatihan Peacekeeper Melalui Garuda Canti Dharma II. *Indonesian Perspective*, 8(1), 24-47. <https://doi.org/10.14710/ip.v8i1.56288>
- Salsabilla, S., & Almubarok, H Z. 2022. *The Civil-Military Relations for State Defense Awareness: Implementation of TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung in Wonosobo*. 5(1), 11-25.
<https://doi.org/10.32699/resolusi.v5i1.2289>
- Wuli, R N., Luddin, M R., & Suyatno, T. 2019. *Conflict Resolution Towards a Sustainable Peace: A Lesson from The Indonesian Military Ordinarate*. 9(3), 341-341.
<https://doi.org/10.5296/ijhrs.v9i3.15274>